



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL BENGKULU

DJKN

LAPORAN KINERJA

KPKNL Bengkulu
Tahun 2023



Daftar Isi

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif



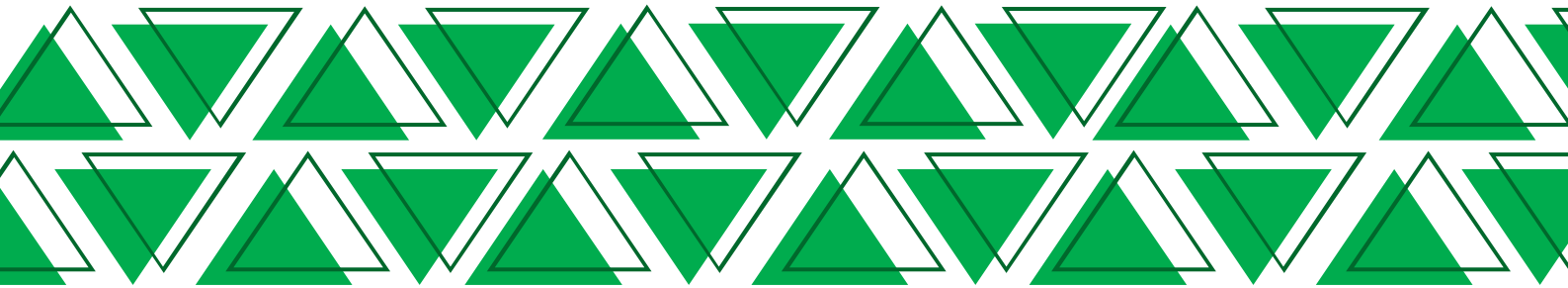
Pendahuluan

Latar Belakang	1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
Peran Strategis Organisasi	3
Isu Strategis Organisasi	5
Sistematika Laporan	6



Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis	7
Perjanjian Kinerja	8
<i>Alignment</i> Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja	12





Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

14

Realisasi Anggaran

61



Penutup

63

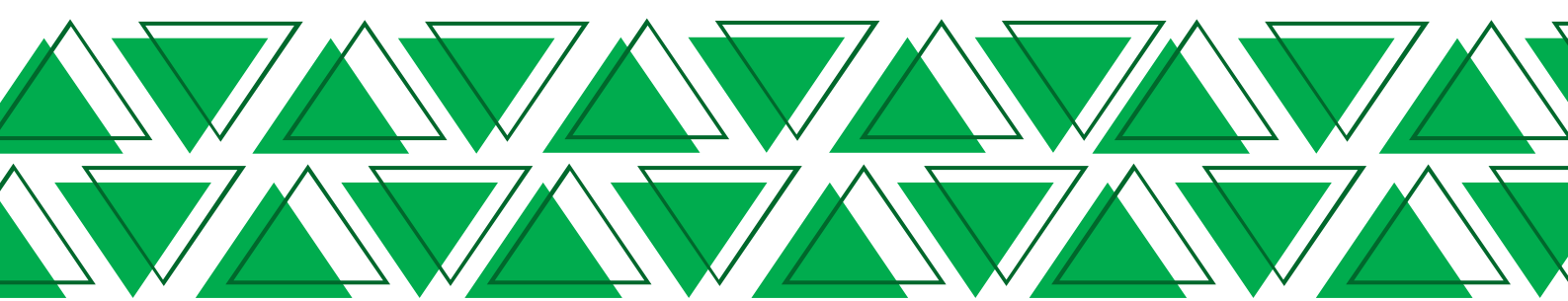
Lampiran

65

Formulir Pengukuran Kinerja

Checklist Kelengkapan Narasi IKU

Perjanjian Kinerja dan Adendum



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja KPKNL Bengkulu sepanjang tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang kepada pengguna layanan. LAKIN tahun 2023 ini merupakan capaian kinerja tahun keempat dalam periode Rencana Strategis DJKN tahun 2020-2024. LAKIN 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-4493/KN.1/2023 Tanggal 29 Desember 2023.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bengkulu tahun 2023 sebesar 113,43%. Capaian tersebut diperoleh dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis. Berdasarkan capaian tersebut, hampir seluruh IKU mencapai target. KPKNL Bengkulu berkomitmen untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan kerja tahun anggaran 2024 sehingga capaian kinerja akan meningkat.

Kami harapkan LAKIN ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Bengkulu. Kepada semua pegawai yang telah mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Bengkulu, kami memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta pihak-pihak yang telah membantu penyusunan LAKIN ini.

Bengkulu, 06 Februari 2024

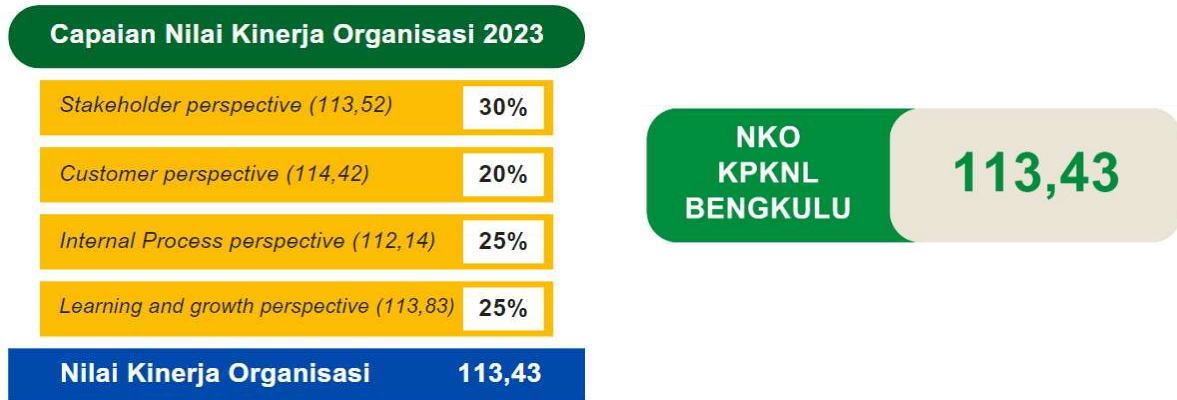
Kepala KPKNL Bengkulu



Ditandatangani secara elektronik
Odyses Medwan Sinurat



IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Bengkulu Tahun 2023 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja DJKN selama tahun 2023 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, Laporan Kinerja DJKN Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Bengkulu atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja KPKNL Bengkulu, digunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPKNL Bengkulu selama tahun 2023.

VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPKNL Bengkulu berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 2020-2024, yaitu menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk menjalankan visi tersebut, KPKNL Bengkulu melaksanakan misi berikut.

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian;

4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

TUJUAN STRATEGIS

Dalam mencapai visi dan misi, DJKN menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut, disusunlah Peta Strategi KPKNL Bengkulu Tahun 2023 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari empat perspektif, yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.

Peta strategi tersebut terdiri dari 9 (sembilan) sasaran strategis setelah ditetapkan adendum. Satu sasaran strategis pada *stakeholder perspective*, satu sasaran strategis pada *customer perspective*, empat sasaran strategis pada *internal process* dan tiga sasaran strategis pada *learning and growth perspective*. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (3) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal; (4) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional; (5) Capaian IKU; (6) Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif; (7) Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif; (8) Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal; dan (9) Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded* dan *Continuously Improved*).

Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan KPKNL Bengkulu, sepanjang tahun 2023, juga telah dilakukan secara bulanan. Hal ini sejalan dengan bentuk komitmen perbaikan dan perubahan. Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan KPKNL Bengkulu yang

dilaksanakan secara bulanan juga merupakan upaya maksimal dalam penggalian *early warning system* sebagai bentuk *awarness* dan terus memaksimalkan upaya mitigasi atas kegiatan pengelolaan kinerja organisasi.

Sejalan dengan kegiatan pengelolaan kinerja, dilaksanakan pula penyelarasan manajemen risiko dengan sistem manajemen kinerja organisasi yang terintegrasi dalam proses bisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 105/KMK.01/2021 tentang petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

BAB I | Pendahuluan

LATAR BELAKANG

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. *Good governance* dapat terwujud melalui keseimbangan tiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Dalam rangka transparansi atas implementasi visi dan misi yang telah dicanangkan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pelaksana tugas Menteri Keuangan di bidang pengelolaan kekayaan negara menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban tertulis berupa Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN mempunyai fungsi ganda sebagai alat kendali, sekaligus alat pemacu peningkatan kinerja dari setiap seksi yang ada di lingkungan KPKNL Bengkulu. Dilihat dari fungsi kendali, kebijakan yang diinisiasi KPKNL Bengkulu nantinya berkontribusi nyata mewujudkan *good governance*. Terkait fungsi pemacu peningkatan kinerja, LAKIN diharapkan menjadi alat bantu (*tool*) internal KPKNL Bengkulu untuk *self assesment* atas kinerja organisasi selama ini.

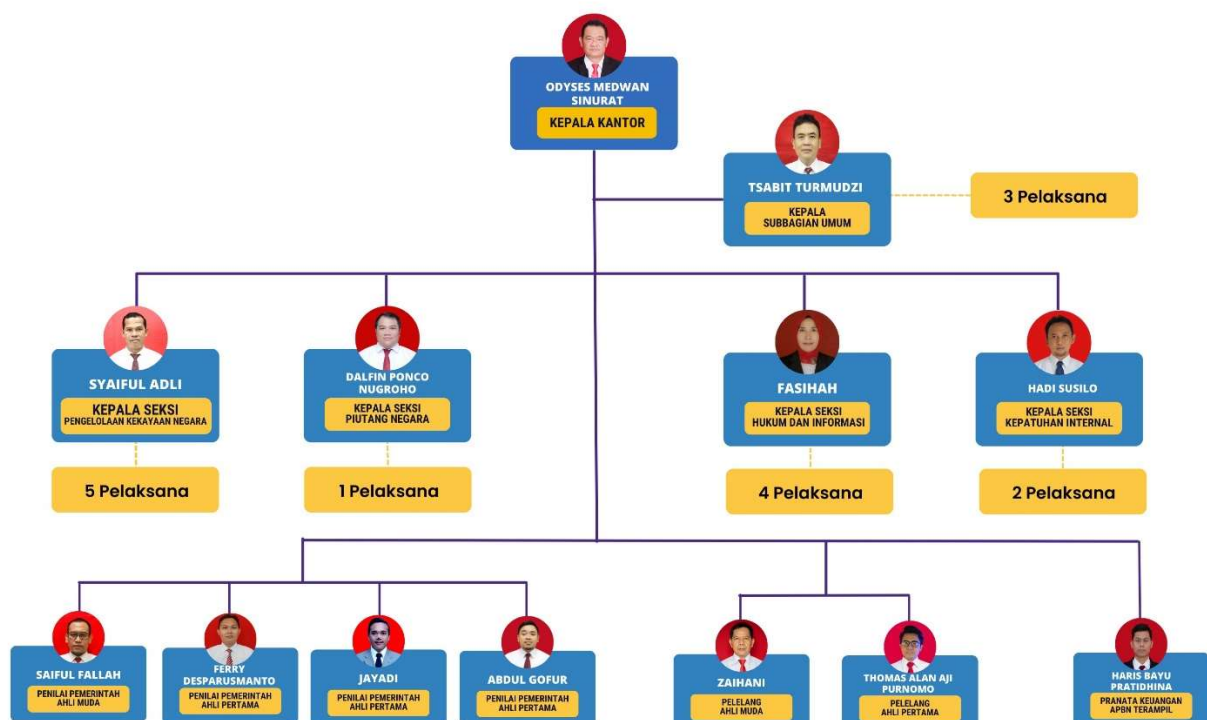
Kami berharap visi KPKNL Bengkulu menjadi kantor pelayanan yang terpercaya dalam pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mampu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPKNL Bengkulu. Visi tersebut memiliki makna adanya tantangan untuk mewujudkan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas dalam pengelolaan kekayaan negara.

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, KPKNL Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang dengan fungsi sebagai berikut:

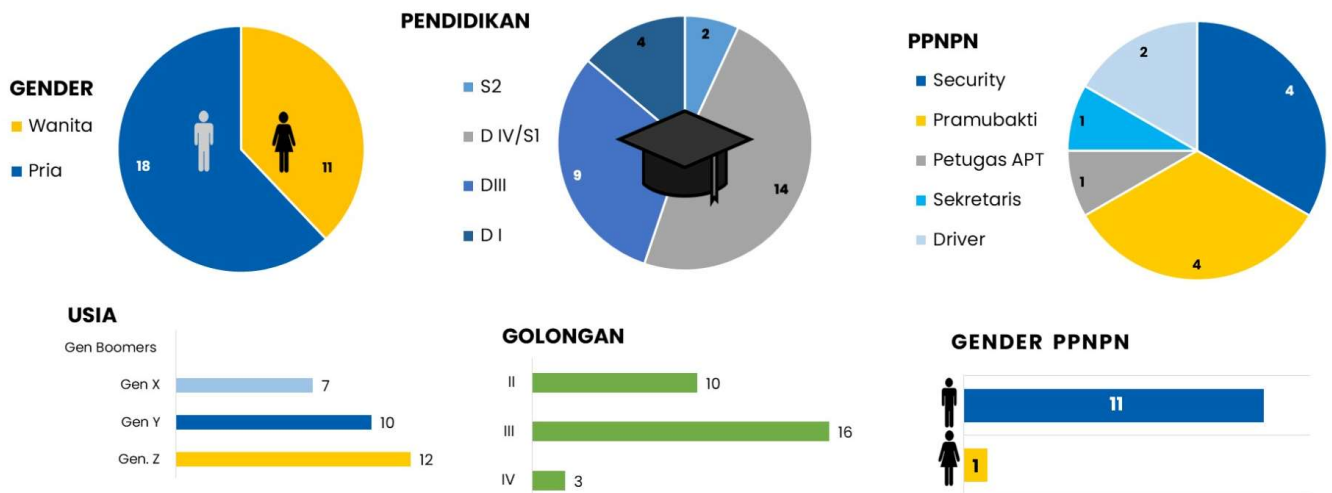
- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala KPKNL dibantu oleh Kepala Subbagian Umum, 4 Kepala Seksi, dan 7 Pejabat Fungsional. Struktur organisasi KPKNL Bengkulu (Periode Desember 2023) dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Adapun komposisi pegawai KPKNL Bengkulu dengan total 29 pegawai ASN (termasuk 1 pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar) dan 12 PPNPN adalah sebagai berikut.

Komposisi Pegawai



Wilayah kerja KPKNL Bengkulu mencakup satu Provinsi Bengkulu dengan total luas 19.919,33 km², 10 Kabupaten/Kota, 128 Kecamatan, 172 Kelurahan, dan 418 Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Perbankan di Provinsi Bengkulu serta masyarakat.

PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang, KPKNL Bengkulu memiliki peran strategis sebagai berikut:

a) Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Bengkulu memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, penyusunan dan penyempurnaan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara.

Sebagai *asset manager*, KPKNL Bengkulu mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan, serta peningkatan alternatif pembiayaan negara melalui instrumen utilisasi barang milik negara (BMN) dengan tujuan utama, yaitu pemanfaatan, penetapan status penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.

Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Selain BMN, Penilai KPKNL Bengkulu juga melakukan penilaian atas aset yang akan ditetapkan statusnya sebagai BMN, seperti dalam proses pengadaan aset dan dalam rangka tukar-menukar BMN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN, Penilai DJKN berwenang untuk melakukan penilaian Kekayaan Negara Dipisahkan, Barang Milik Daerah, dan Kekayaan Negara Lain-lain.

b) Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Bengkulu di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apa pun.

Selain itu, tugas KPKNL Bengkulu dalam pengurusan piutang negara adalah menyiapkan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

c) Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Bengkulu secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang, baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Bengkulu diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

- d) Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, KPKNL memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengelolaan Piutang Negara. Pada pengelolaan kekayaan negara, KPKNL memperoleh PNBP melalui pemanfaatan BMN. Salah satu mekanisme pemanfaatan yang sering digunakan adalah sewa sebagian atau seluruh BMN pada satuan kerja yang di kelola KPKNL Bengkulu, yang mana biaya sewa tersebut disetorkan ke kas negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil bea lelang termasuk biad balai lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

ISU STRATEGIS ORGANISASI

1. Proses Pensertipikatan BMN berupa tanah diatur melalui Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 49 ayat 1 yang berbunyi “Seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan”. KPKNL Bengkulu melakukan sinergi dan koordinasi percepatan pensertipikatan BMN Bersama dengan BPN di Provinsi Bengkulu.
2. Kontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional dengan menggandeng dan memfasilitasi para pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memasarkan produknya melalui laman portal lelang.go.id.

3. Sinergi dan koordinasi antara Penilai DJKN dengan Penilai dari unsur Kejaksanaan dan Pemerintah Daerah. Koordinasi tersebut berupa asistensi dari para penilai DJKN. Asistensi yang sudah berjalan pada tahun 2023 ialah Bersama Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Kejaksanaan Tinggi Bengkulu.

SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan ini, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV Penutup

Lampiran

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan selama tahun 2023, KPKNL Bengkulu telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam BAB II Laporan ini.

BAB II | Perencanaan Kinerja

RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Perencanaan strategis ditetapkan dengan beorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang saat ini dihadapi maupun yang akan timbul.

Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

”Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam rangka mendukung visi tersebut, strategi yang ditetapkan KPKNL Bengkulu dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara
 - a. Implementasi basis akrual dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sebagai bahan untuk menyusun LKPP.
 - b. Meningkatkan kualitas penyajian Nilai BMN di dalam Laporan BMN dan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
 - c. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
 - d. Percepatan sertifikasi BMN.
2. Peningkatan kualitas pelayanan
 - a. Penerapan regulasi dan pedoman di bidang penilaian.
 - b. Standardisasi pelayanan penilaian pada instansi vertikal.
 - c. Pengawasan dan pembinaan penilai pemerintah.
 - d. Pengembangan riset data dan informasi penilaian.
3. Optimalisasi pengurusan piutang negara
 - a. Memprogramkan kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN diatas 1 Milyar.
 - b. Optimalisasi tahap pengurusan.
 - c. Penggalan potensi pengurusan piutang negara.

4. Peningkatan pelayanan lelang
 - a. Modernisasi lelang melalui e-auction
 - b. Penguatan jabatan fungsional Pelelang.
 - c. Penggalian potensi lelang untuk seluruh jenis lelang.
5. Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja secara optimal.
 - b. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai.
 - c. Penerapan TIK yang komprehensif.
 - d. Penerapan sistem informasi sesuai core bussiness.
 - e. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.
 - f. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
 - g. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan.

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

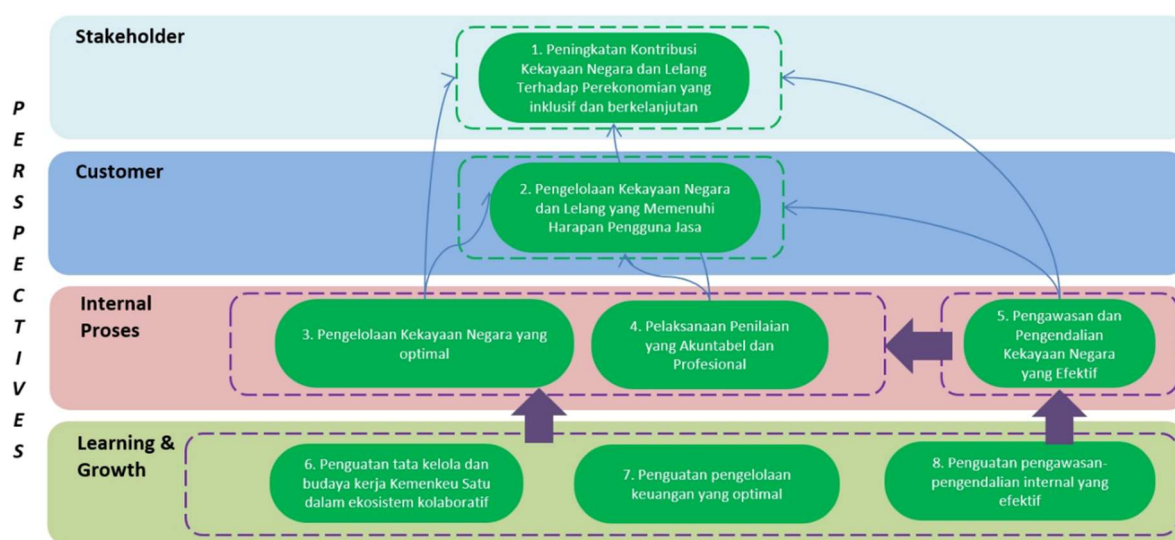
Hal ini selaras dengan program pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang didasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan serta selanjutnya diperbaharui melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Peta Strategi KPKNL Bengkulu menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang

dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Peta strategi KPKNL Bengkulu di awal tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Bengkulu Nomor: PK-1/WKN.05/2023 tanggal 31 Januari 2023, KPKNL Bengkulu memiliki 8 (delapan) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut.

Peta Strategi KPKNL Bengkulu tahun 2023



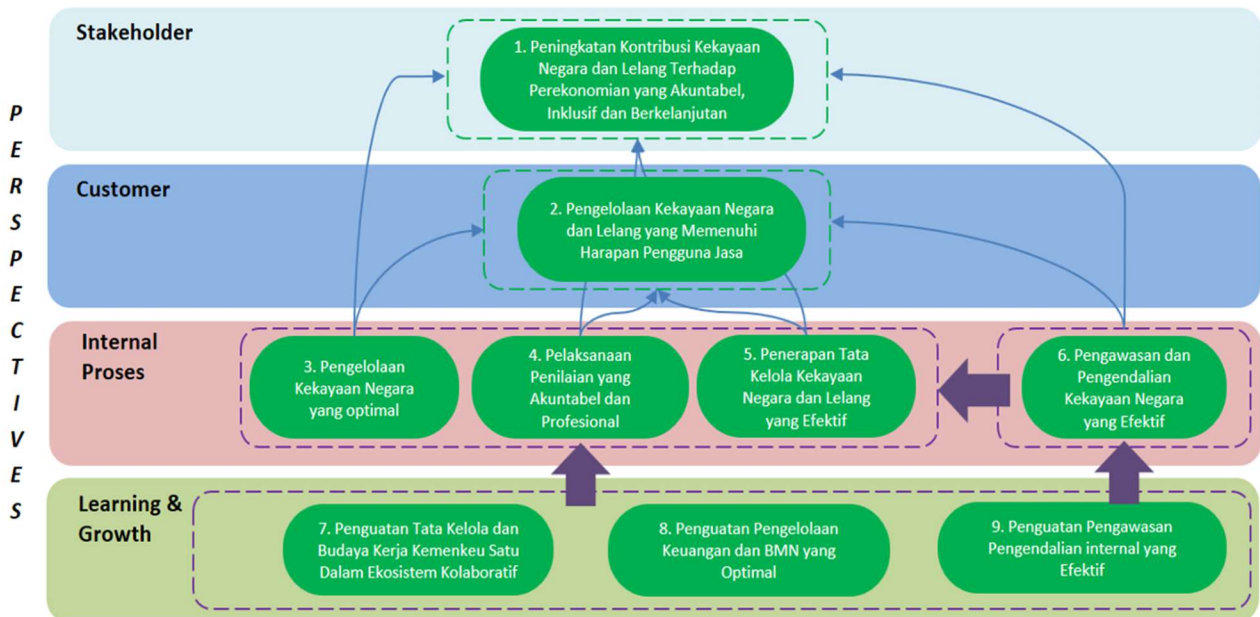
Target IKU KPKNL Bengkulu Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100
		2c-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68
		3b-CP	Persentase Penyelesaian BKPN	100
		3c-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25

		4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	70
5	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86
		5b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15
6	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	6a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100
		6b-N	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86
		6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	7a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100 (95,5)
		7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
8	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	8a-CP	Indeks Integritas	88,67
		8b-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100
		8c-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Adapun dalam tahun berjalan terdapat addendum perjanjian kinerja yang telah disepakati berdasarkan *Addendum* Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Bengkulu Nomor: PK-1.1A/WKN.05/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Peta Strategi KPKNL Bengkulu tahun 2023 (setelah adendum)



Dalam addendum tersebut terdapat perubahan sasaran strategis, penambahan sasaran strategis, perubahan nama IKU, reposisi IKU dan antar sasaran strategis, penambahan IKU, penghapusan IKU, perubahan *trajectory* target IKU, dan perubahan kode SS dan IKU. Adapun

penjabaran sasaran program/kegiatan dan uraian indikator kinerja setelah adendum adalah sebagai berikut.

Target IKU KPKNL Bengkulu Tahun 2023 (setelah adendum)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80
		1c-CP	Indeks Integritas	88,67
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100
		2c-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68
		3b-CP	Persentase Efektifitas Penyelesaian BKP	100
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25
		4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
		5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100
		7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100 (95,5)
		8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
		8c-CP	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	15
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	9a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	88,67
		9b-CP	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

ALIGNMENT RENSTRA DJKN, RENJA K/L, DAN PERJANJIAN KINERJA

NO	IKU pada Renstra 2020-2024	Target 2023	IKU pada Renja 2023	Target 2023	IKU pada PK	Target 2023
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
2	Persentase Produktivitas Lelang	34	Persentase Produktivitas Lelang	36	Persentase Produktivitas Lelang	80
3	Indeks Integritas	91,5	Indeks Integritas	91,5	Indeks Integritas	88,67
4	Persentase pencapaian hasil lelang (pokok lelang)	100	-	-	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100
5	-	-	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100
6	Persentase bidang tanah yang disertipikatkan	100	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100
7	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68
8	Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN	100	-	-	Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN	100
9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	27	-	-	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25
10	-	-	-	-	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	70
11	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	-	-	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
12	-	-	-	-	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86
13	Persentase tindak lanjut pengelolaan aset	80	Persentase tindak lanjut pengelolaan kekayaan negara	80	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86
14	-	-	-	-	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100
15	-	-	-	-	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100

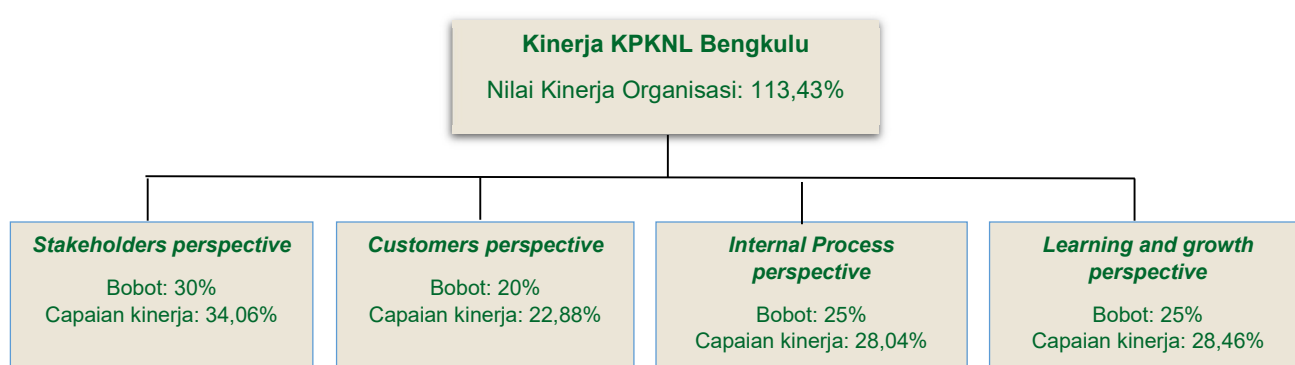
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU

16	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100 (95,5)
17	-	-	-	-	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
18	-	-	-	-	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15
19	-	-	-	-	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	88,67
20	-	-	-	-	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

BAB III | Akuntabilitas Kinerja

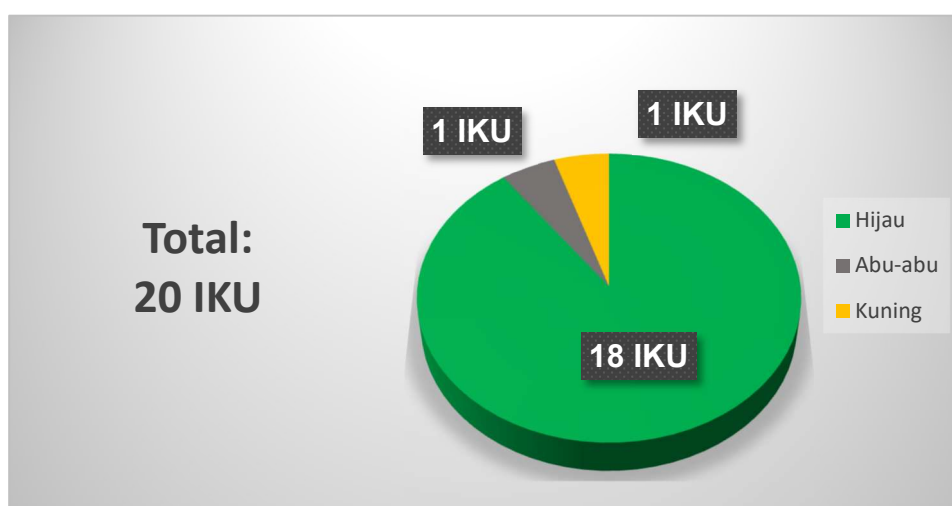
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bengkulu adalah sebesar 113,43%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut.

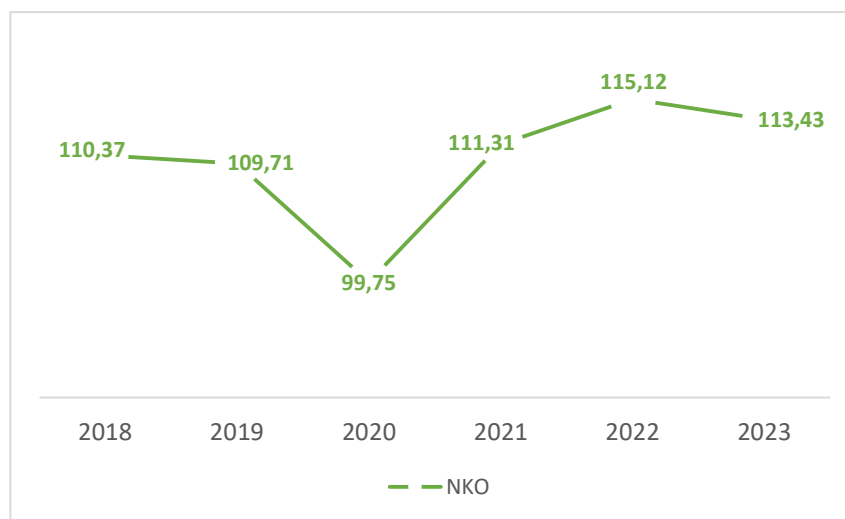


Dari 20 IKU yang dimiliki, KPKNL Bengkulu memiliki capaian 18 IKU berstatus hijau, 1 IKU berstatus kuning, dan 1 IKU berstatus abu-abu.

Capaian Status IKU KPKNL Bengkulu Tahun 2023



Sebagai perbandingan, grafik berikut adalah capaian Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir.



Dari grafik di atas, capaian NKO KPKNL Bengkulu pada 2023 sedikit menurun dibanding capaian pada 2022, tetapi masih tetap lebih baik dibandingkan capaian pada tahun 2018 sampai dengan 2021.

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan

Kontribusi pengelolaan kekayaan Negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan Negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi.

KPKNL Bengkulu sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara turut mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional melalui sinergi bersama Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan perbankan di lingkungan Provinsi Bengkulu. Salah satunya pada pengelolaan BMN yang mengakomodasi penyederhanaan proses bisnis dan penyesuaian tarif pemanfaatan BMN. Program ini memberikan keringanan tarif sewa dengan diskon tarif hingga 50 persen bagi UMKM yang memanfaatkan BMN milik Kementerian/Lembaga. Dengan ini, BMN tetap optimal dimanfaatkan oleh pelaku usaha serta mampu membantu UMKM dalam meningkatkan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Crash program keringanan utang yang sudah dijalankan mulai tahun 2021 juga diperpanjang untuk pelunasan sampai dengan bulan Desember 2023. Melalui program ini, debitur yang mengalami kesulitan untuk melunasi utang kepada pemerintah diharapkan dapat terbantu dan memanfaatkan program ini dengan baik.

Selain itu, pelayanan lelang melalui portal lelang.go.id juga turut serta memberdayakan UMKM. *Marketplace* ini dapat dimanfaatkan para UMKM untuk menjual dan memasarkan usahanya. Hal ini membantu UMKM dalam menjangkau konsumen lebih luas dan dapat menjadi solusi alternatif bagi UMKM selain memasarkan secara langsung.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 2 IKU yang diuraikan sebagai berikut.

a) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang KPKNL Bengkulu berasal dari:

1) PNBP Pengelolaan BMN

Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a) penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b) pemanfaatan barang milik negara; dan
- c) pemindahtanganan barang milik negara yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

2) PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3) PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- a) bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- b) bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c) biaya permohonan lelang,
- d) uang jaminan pembeli wanprestasi,
- e) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Sampai dengan triwulan IV 2023, realisasi penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar Rp6.030,35 M dari target 2023 sebesar Rp4.816,5 M, sehingga indeks capaian s.d. triwulan IV sebesar 125,20%. Penerimaan tersebut berasal didapat dari rincian berikut.

Penerimaan	Target 2023	Realisasi 2023
PNBP Pengelolaan BMN	Rp3.801.000.000	Rp4.945.042.658
PNBP Piutang Negara	Rp 500.000	Rp 998.687
PNBP Lelang	Rp1.015.000.000	Rp1.084.305.641

Jika dibandingkan dengan indikator Kinerja pada Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 serta Rencana Kerja K/L Tahun 2023, sebesar 100%, hal ini masih sesuai/sejalan.

Dalam 5 tahun terakhir, terlihat adanya tren kenaikan capaian dari target yang ditetapkan. Berikut adalah perbandingan target dan realisasi IKU dalam 5 tahun terakhir.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	102,35%	83,32%	140,55%	157,73%	125,20%

Adapun kendala/ akar masalah dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1) Terdapat sewa BMN yang belum diajukan persetujuannya kepada KPKNL
- 2) Aplikasi lelang.co.id yang belum dikenal luas oleh masyarakat
- 3) BKPN aktif merupakan BKPN dengan pengurusan lebih dari 5 tahun sebanyak 7 berkas dari 14 berkas yang aktif sehingga keberadaan debitur sulit ditelusuri
- 4) Potensi angsuran dan pelunasan yang menghasilkan PNBP memiliki peluang kecil
- 5) Rendahnya daya beli masyarakat melalui lelang.go.id

Mitigasi risiko/tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dengan satker terkait potensi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- 2) Melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang
- 3) Koordinasi dengan satker terkait potensi penerimaan Negara dari Biad PN
- 4) Koordinasi dengan Debitur tentang *Crash Program*
- 5) Memberikan pelayanan *online* untuk memberikan kemudahan kepada *stakeholders*

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1a-CP	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian						
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	12,96%	47,79%	47,79%	68,58%	125,20%	125,20%	
Capaian	Rp. 624.633.675	Rp. 2.013.021.932	Rp. 2.013.021.932	Rp. 3.302.908,884	Rp 6.030.346.986	Rp 6.030.346.986	

Tindakan *extra effort* yang telah dilakukan, antara lain:

- 1) Membentuk *WhatsApp Group* bersama operator satker sebagai sarana diskusi terkait pengelolaan BMN
- 2) Melakukan sosialisasi lelang.go.id untuk mengenalkan ke masyarakat umum dan pelaku UMKM. Sosialisasi kepada UMKM dilaksanakan pada 2 Agustus 23 kepada binaan UMKM Kemenkeu Satu Bengkulu.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam mencapai IKU ini adalah sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Penerbitan Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp57.180.000,00	Rp50.895.000,00	Dihasilkan 201 surat persetujuan/penolakan
2	Penerbitan Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	Rp22.205.000,00	Rp8.710.000,00	Dihasilkan 25 BKPN
3	Pelaksanaan Lelang	Rp4.260.000,00	Rp3.980.000,00	Dihasilkan 400 Risalah Lelang
4	Pelaksanaan Lelang Sukarela UMKM (PU)	Rp40.000.000,00	Rp20.429.400,00	Dihasilkan 22 Risalah Lelang Sukarela UMKM
5	Penggalian Potensi Lelang	Rp60.000.000,00	Rp53.990.000,00	Dihasilkan 5 Rekomendasi

Rencana aksi selanjutnya, yaitu:

- 1) Melanjutkan kegiatan koordinasi dan sinergi yang telah dilakukan pada periode sebelumnya
- 2) Melakukan penggalian potensi Lelang
- 3) Melaksanakan monitoring capaian PNBPN

b) Persentase Produktivitas Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Tujuan IKU ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

IKU ini memperhitungkan antara ((persentase lot laku per jenis lelang/ target % lot laku lelang per jenis lelang)/ jumlah jenis lelang yang dilaksanakan) x 40%) + (jumlah realisasi frekuensi lelang/ target frekuensi lelang)x60%

Sepanjang tahun 2023, lelang telah dilaksanakan sebanyak 871 lot. Sementara jumlah frekuensi lelang laku sebanyak 287 lot sehingga realisasi IKU tahun 2023 adalah sebesar 105% dari target sebesar 80%.

Jika dibandingkan dengan target indikator kinerja pada Renstra sebesar 34% dan Renja sebesar 36%, berarti hal ini masih sejalan/sesuai. Kenaikan target yang cukup besar pada perjanjian kinerja terjadi karena adanya perubahan formula IKU di tahun 2023 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dalam 5 tahun terakhir, produktivitas lelang selalu melebihi dari target yang ditetapkan awal tahun. Berikut adalah target dan realisasi IKU sejak 2019.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	32%	34%	35%	36%	80%
Realisasi	37,71%	39,52%	39,79%	52,57%	105,00%

Kendala/ akar masalah dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1) Adanya 'kontradiksi' antara upaya pencapaian Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online dengan IKU persentase produktivitas lelang.
- 2) Harga limit lelang terlalu tinggi

Mitigasi atau indakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas, yaitu:

- 1) Melakukan publikasi dan pemasaran objek lelang melalui media sosial
- 2) Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Perbankan/Pemerintah daerah/*Stakeholders*
- 3) Melakukan penggalan Potensi lelang

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1b-CP	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian						
	Persentase produktivitas lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	30%	45%	45%	60%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	39,62%	71.02%	71.02%	92,72%	105%	105%	
Capaian	42/109	132/352	132/352	171/542	287/871	287/871	

Tindakan *extra effort* yang telah dilakukan, antara lain:

- 1) Mou dan koordinasi intensif dengan Stakeholder lelang;
- 2) Pelaksanaan rangkaian lelang (Non eksekusi sukarela (UMKM) dan eksekusi Hak Tanggungan) dalam rangka peringatan hari lelang.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam mencapai IKU ini adalah sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Pelaksanaan Lelang	Rp4.260.000,00	Rp3.980.000,00	Dihasilkan 400 Risalah Lelang
2	Pelaksanaan Lelang Sukarela UMKM (PU)	Rp40.000.000,00	Rp20.429.400,00	Dihasilkan 22 Risalah Lelang Sukarela UMKM
3	Penggalan Potensi Lelang	Rp60.000.000,00	Rp53.990.000,00	Dihasilkan 5 Rekomendasi

Adapun rencana aksi ke depan yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Melanjutkan kegiatan koordinasi dan sinergi yang telah dilakukan pada periode sebelumnya
- 2) Memprioritaskan pelaksanaan lelang yang berpotensi laku tinggi
- 3) Melakukan publikasi & pemasaran objek lelang melalui media sosial

c) Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI responden terdiri dari:

- 1) Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
- 2) Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

- 1) Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
- 2) Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
- 3) Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
- 4) Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
- 5) Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (*Proportional Stratified Random Sampling*).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

- 1) Internal
- 2) Perdagangan Pengaruh;
- 3) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 4) Pengelolaan SDM;
- 5) Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
- 6) Sosialisasi Antikorupsi; dan
- 7) Transparansi.
- 8) Eksternal

- 9) Upaya Pencegahan Korupsi;
- 10) Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
- 11) Integritas Pegawai.

IKU Indeks Integritas memiliki target sebesar 80 dengan realisasi 89,17 sehingga capaian sebesar 100,56. Jika dibandingkan dengan Indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Renstra dan Renja sebesar 91,5, target pada perjanjian menurun karena target sub IKU Indeks Integritas DJKN ditetapkan sesuai dengan manual IKU Kemenkeu-One.

IKU indeks integritas di KPKNL Bengkulu termasuk IKU baru sehingga belum ada data historis terkait capaian di tahun-tahun sebelumnya.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	-	-	-	-	88,67
Realisasi	-	-	-	-	89,17

Adapun permasalahan/kendala dalam pencapaian sub IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengiriman *link* survei dan monitoring survei dilakukan seluruhnya oleh KPK;
- 2) List pertanyaan sudah ditetapkan oleh KPK selaku inisiator survey;
- 3) Seorang pegawai dapat menjadi responden internal bagi unit kerja DJKN dan responden eksternal bagi unit kerja yang lain sehingga pegawai tersebut menjadi kebingungan.

Mitigasi yang telah dilaksanakan, yaitu mensosialisasikan saluran pengaduan baru (SP4N LAPOR!) melalui postingan media sosial.

Trajectory IKU pada 2023 adalah sebagai berikut.

1c-CP	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	88,67	88,67	Max/TLK
Realisasi						89,17	89,17	
Capaian						100,56%	100,56%	

Tindakan *extra effort* yang dilaksanakan, yaitu melakukan monitoring pengisian survei dan mengingatkan pegawai yang menerima tautan survei untuk segera mengisi survey tersebut.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam mencapai IKU ini adalah sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Kepatuhan Internal	Rp4.402.000	Rp4.190.000	7 rekomendasi

Rencana Aksi yang dilakukan, yaitu melakukan pemetaan atas komponen yang perlu dipertahankan dan komponen yang perlu ditingkatkan.

2. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 3 IKU yang diuraikan sebagai berikut.

a) Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Target jumlah pokok lelang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp29,1 M.

Realisasi pokok lelang dari Pejabat Lelang Kelas I (PL I) dan Pegadaian s.d. triwulan IV 2023 adalah:

- 1) Pokok lelang PL Kelas I mencapai Rp14.532,44 M dari target sebesar Rp20 M
- 2) Pokok lelang pegadaian mencapai Rp21.421,70 M dari target Rp9,1 M.

Realisasi pokok lelang secara keseluruhan adalah sebesar Rp35.954,14 M (123,55%) dari target sebesar Rp29,1 M (100%). Untuk itu, kedua capaian pokok lelang dari PL I dan pegadaian turut menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKU. Jika dibandingkan dengan target pada renstra sebesar 100, hal ini masih sesuai/sejalan.

Jika dilihat perbandingan dari tahun 2020, realisasi pokok lelang mengalami perkembangan positif terhadap target yang ditetapkan awal tahun. Berikut adalah target dan realisasi IKU dalam 5 tahun terakhir.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	63,08%	46,24%	100,47%	173,55%	123,55%

Meski secara persentase mengalami penurunan dibanding tahun 2022, tetapi secara jumlah realisasi capaiannya meningkat dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan target pada 2023 cukup besar dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp20 M.

Kendala/ akar masalah yang dihadapi dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1) Daya beli masyarakat yang menurun berpengaruh pada kegiatan ekonomi secara umum
- 2) Banyaknya Lelang TAP

Tindakan untuk mengatasi hal tersebut di atas, yaitu:

- 1) Melakukan publikasi & pemasaran objek lelang melalui media sosial
- 2) Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Perbankan/Pemerintah daerah/Stakeholders
- 3) Melakukan penggalian Potensi lelang

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2023 sebagai berikut.

2a-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	Persentase realisasi pokok lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	10,80%	38.15%	38.15%	66,22%	123,55%	123,55%	
Capaian	Rp.3.143.145.697	Rp.11.100.835.886	Rp.11.100.835.886	Rp19,270,226,356	Rp.35,954,146,778	Rp.35,954,146,778	

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan terhadap IKU tersebut, yaitu:

- 1) Koordinasi intensif dengan stakeholder lelang
- 2) Penggalian Potensi lelang

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Pelaksanaan Lelang	Rp4.260.000,00	Rp3.980.000,00	Dihasilkan 400 Risalah Lelang
2	Pelaksanaan Lelang Sukarela UMKM (PU)	Rp40.000.000,00	Rp20.429.400,00	Dihasilkan 22 Risalah Lelang Sukarela UMKM
3	Penggalian Potensi Lelang	Rp60.000.000,00	Rp53.990.000,00	Dihasilkan 5 Rekomendasi

Adapun rencana aksi ke depannya untuk meningkatkan pencapaian IKU adalah:

- 1) Melanjutkan kegiatan koordinasi dan sinergi yang telah dilakukan pada periode sebelumnya
- 2) Memprioritaskan pelaksanaan lelang yang berpotensi laku tinggi
- 3) Melakukan publikasi & pemasaran objek lelang melalui media sosial

b) Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan *outstanding* BKPN (nilai saldo piutang negara).

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- 1) PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- 2) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- 3) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) termasuk koreksi karena kesalahan pencatatan

- 4) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- 5) Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*.

Target Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara adalah sebesar 100% (Rp50 juta). Sampai dengan triwulan IV 2023, realisasi penurunan *outstanding* piutang negara sebesar 140,54% (Rp70.267.563,00). Jika dibandingkan dengan Rencana Kerja K/L pada 2023 sebesar 100%, hal ini masih sesuai/sejalan.

Berikut adalah capaian IKU dalam 5 tahun terakhir.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	100%	-	100%	100%	100%
Realisasi	121,16%	-	131,00%	107,30%	140,54%

Kendala/ akar masalah yang dihadapi dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1) Beberapa kreditur sulit dihubungi terkait kerjasama dalam mencari keberadaan debitur
- 2) Kurangnya perhatian K/L dalam mengelola piutang
- 3) BKPN yang diperkirakan berpotensi mengikuti crash program tidak membayarkan sesuai surat persetujuan yang diterbitkan.

Mitigasi/tindakan yang telah dilakukan, antara lain:

- 1) Melakukan monitoring pada aplikasi FocusPN
- 2) Melakukan penagihan kepada debitur secara langsung maupun melalui surat dan media telekomunikasi lainnya

Adapun trajectory IKU pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

2b-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lejang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	52,43%	57.30%	57.30%	72,70%	140,54%		
Capaian	Rp.26.214.818	Rp.28.647.990	Rp.28.647.990	Rp.36.352.274	Rp.70.267.563		

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU, antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi pengelolaan piutang daerah pada 29 September 2023
- 2) Melaksanakan mekanisme keringanan utang (*crash program*)

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Penerbitan Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	22.205.000	8.710.000	Dihasilkan 25 berkas keputusan
2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	3.200.000	2.707.500	Dihadiri sejumlah 150 orang

Adapun rencana aksi ke depannya, antara lain:

- 1) Berkoordinasi dengan satker dalam pengelolaan piutang negara/daerah
- 2) Melakukan penagihan kepada debitur secara langsung maupun melalui surat dan media telekomunikasi lainnya

c) **Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan**

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau *update* data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

IKU ini bertujuan untuk mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

Perhitungan capaian IKU adalah sebagai berikut.

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{capaian K1} + \text{K2} + \text{K3} + \text{K4}}{\sum \text{target K1} + \text{K2} + \text{K3} + \text{K4}} \times 100\%$$

Keterangan	Bukti Dukung
K1 : Output berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP) dan update data tanah di Master Aset SIMAN serta validasi di valserah	Dibuktikan dengan screenshot Nomor SHP dan update Capaian pada SIMAN
K2 : Output berupa Peta Bidang Tanah (PBT)	Dibuktikan dengan screenshot PBT
K3 : Output berupa Peta Bidang Tanah/Produk Lainnya	Dibuktikan dengan screenshot PBT/Produk Lainnya
K4 : Output berupa update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertifikasi Tanah (Valserah)	Dibuktikan dengan screenshot validasi pada valserah

IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipatkan memiliki besaran target sebesar 100% (274 NUP) dengan realisasi 106,20% (291 NUP). Jika dibandingkan dengan indikator kinerja pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 dan Rencana Kerja K/L pada 2023 sebesar 100%, hal ini masih sesuai/sejalan

Dalam 5 tahun terakhir, IKU ini selalu mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Berikut adalah pencapaian IKU dalam 5 tahun terakhir.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	101,38%	100%	129,56%	106,20%

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU yaitu terdapat kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pensertipkatan yang harus dilengkapi oleh satuan kerja.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu dengan melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap proses penyelesaian sertifikasi aset BMN berupa tanah pada satuan kerja yang menjadi target sertifikasi melalui surat atau media sosial.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2023, yaitu:

2c-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target		40%	40%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	0	59.49%	59.49%	63,87%	106,20%	106,20%	
Capaian	0	163 NUP	163 NUP	175 NUP	291 NUP	291 NUP	

Tindakan extra effort yang telah dilaksanakan, antara lain:

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan diskusi permasalahan yang dihadapi dalam rangka percepatan pensertipikatan berupa tanah pada 23 Februari 2023. Sosialisasi dilakukan Bersama Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dengan mengundang seluruh *stakeholder* di wilayah Bengkulu
- 2) Melakukan koordinasi atas tindak Lanjut Objek Pensertipikatan BMN berupa Tanah TA 2023 yang belum diajukan permohonan ke Kantor Pertanahan

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	17.673.000	14.755.000	Dihasilkan 281 Rekomendasi

Rencana aksi yang akan dilakukan, antara lain:

- 1) Terus koordinasi dan pemantauan terhadap proses penyelesaian sertifikasi aset BMN berupa tanah pada satuan kerja dan Kantor BPN yang menjadi target sertifikasi melalui surat atau media komunikasi
- 2) Menyampaikan surat imbauan kepada satker terkait permohonan melengkapi dokumen penerbitan sertifikasi BMN

3) Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila

- 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*)
- 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBP (*revenue generating*)
- 3) Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)

- 4) Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset, misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat
- 5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum
- 6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 3 IKU yang diuraikan sebagai berikut.

a) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN) merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar.

Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara dengan tujuan menyajikan realisasi atas optimalisasi Penerimaan Negara yang bersumber dari BMN.

IKU Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK memiliki indeks besaran target sebesar 68% dan realisasi sebesar 72,73% sehingga capaian 106,95% (713 NUP). Jika dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 dan Rencana Kerja K/L tahun 2023 sebesar 65%, hal ini masih sesuai/selaras.

Capaian IKU mulai tahun 2021 selalu mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Berikut capaian IKU beberapa tahun terakhir.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	-	-	62%	65%	68%
Realisasi	-	-	73,19%	77,28%	72,73%

Dalam pencapaian IKU ini, kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Pengisian formulir oleh Satker tidak tepat waktu dan tidak lengkap
- 2) Kurangnya kesadaran satker dalam mengelola potensi BMN

Mitigasi/tindakan yang sudah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut di atas, yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh satker di lingkungan KPKNL Bengkulu terkait pengisian form pendataan SBSK
- 2) Melakukan sosialisasi SBSK terhadap satker
- 3) Melakukan Edukasi dan komunikasi SBSK
- 4) Melakukan Survei Fisik dalam rangka Evaluasi SBSK

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

3a-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal						
	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	50%	50%	55%	68%	68%	Max/TLK
Realisasi		81.45%	81.45%	79,44%	72,73%	72,73%	
Capaian		182/713	182/713	350/713	713/713	713/713	

Tindakan *extra effort* dalam pencapaian IKU, antara lain:

- 1) Melakukan survei fisik dalam rangka Evaluasi SBSK
- 2) Melakukan permintaan data terkait Kesesuaian SBSK

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	60.920.000	48.490.000	Dihasilkan 673 Rekomendasi

Rencana aksi ke depan untuk meningkatkan pencapaian IKU, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan seluruh satker di lingkungan KPKNL Bengkulu terkait pengisian form pendataan SBSK.

b) **Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara**

IKU Persentase Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

- 1) BKPN Lunas (SPPNL)
- 2) BKPN Penarikan (SPPNS)
- 3) BKPN Dikembalikan (SKPBN), dan
- 4) BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
- 5) Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat)

IKU Persentase Penyelesaian BKPN pada tahun 2023 memiliki indeks besaran target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% untuk capaian 4 BKPN. Jika dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 100%, hal ini masih sesuai/selaras.

Berikut perbandingan pencapaian IKU sejak tahun beberapa tahun terakhir.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	-	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	380%	100%	113%	100%

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU, antara lain:

- 1) BKPN yang diperkirakan berpotensi mengikuti *crash program* tidak membayarkan sesuai surat persetujuan yang diterbitkan
- 2) Beberapa kreditur sulit dihubungi terkait kerja sama dalam mencari keberadaan debitur
- 3) BKPN aktif merupakan BKPN dengan pengurusan lebih dari 5 tahun sebanyak 7 berkas dari 14 berkas yang aktif sehingga keberadaan debitur sulit ditelusuri

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala di atas, yaitu:

- 1) Melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan kreditur
- 2) Melakukan publikasi dan sosialisasi *Crash Program*

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

3b-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal						
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	66,67%	100%	100%	60%	100%	100%	
Capaian	2 BKPN	3 BKPN	3 BKPN	3 BKPN	4 BKPN	4 BKPN	

Tindakan *extra effort* yang telah dilakukan, antara lain:

- 1) Melakukan penagihan kepada debitur secara langsung maupun melalui surat dan media telekomunikasi lainnya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut

Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
Penerbitan Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	22.205.000	8.710.000	Dihasilkan 25 berkas keputusan

Rencana ke depannya yang dapat dilakukan, yaitu dengan terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan kreditur

4) Sasaran Strategis: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Hal ini ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN.

Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi ke dalam 2 IKU yang akan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

a) Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah

hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian, nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. IKU ini bertujuan untuk mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam penentuan tarif pemanfaatan dan nilai limit penjualan.

IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian pada tahun 2023 memiliki indeks besaran target sebesar 25% dan realisasi sebesar 0% dengan polarisasi *minimize*. Jika dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 27%, hal ini masih sesuai/selaras.

Dalam 2 tahun terakhir, tidak terdapat deviasi dalam ketergunaan hasil penilaian. Berikut adalah perbandingan target dan realisasi IKU dalam beberapa tahun terakhir.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	-	30%	22%	19%	25%
Realisasi	-	1,71%	0,79%	0%	0%

Untuk itu, tidak ada kendala/permasalahan dalam pencapaian IKU ini. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan, antara lain:

- 1) Berkoordinasi dengan seksi PKN untuk menjaga deviasi ketergunaan hasil penilaian sehingga laporan penilaian dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan dalam membuat keputusan
- 2) Melakukan peer-reviu Laporan Penilaian

Berikut *trajectory* IKU pada tahun 2023.

4a-CP	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional						
	Deviasi ketergunaan hasil penilaian						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Min/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan, yaitu:

- 1) Melakukan pengendalian kualitas hasil penilaian dengan melaksanakan *4 line of defense*, yaitu : monitoring atas konsep laporan, kegiatan pemaparan, prakajul dan kaji ulang laporan penilaian

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp57.180.000,00	Rp50.895.000,00	201 surat persetujuan/penolakan
2	Rekomendasi Hasil Penilaian	Rp13.440.000,00	Rp12.270.000,00	Dihasilkan 2 rekomendasi

Rencana aksi yang akan dilakukan ke depan agar pencapaian IKU tetap terjaga, antara lain:

- 1) Memastikan data/informasi yg diperoleh tim Penilai update dan akuntabel
- 2) Terus berkoordinasi dengan seksi PKN untuk menjaga deviasi ketergunaan hasil penilaian sehingga laporan penilaian dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan dalam membuat Keputusan.

b) Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam

Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada

Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

- 1) Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon
- 2) Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
- 3) Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD)
- 4) Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
 - c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*);

e. objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan. sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL)

5) Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian.

Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian.

Penilaian secara tepat waktu adalah:

- 1) penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian property dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- 2) penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- 3) penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- 4) penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- 5) penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian bisnis
- 6) penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam

(jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

Terhadap permohonan penilaian yang bersifat masal dan memerlukan koordinasi dengan beberapa unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, tidak memperhitungkan lama Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam penentuan Penilaian secara tepat waktunya, sehingga perlu dirumuskan lama waktu maksimal terhadap permohonan tersebut menjadi:

- 1) penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- 2) penilaian yang dilaksanakan paling lama 34 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- 3) penilaian yang dilaksanakan paling lama 23 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- 4) penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- 5) penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian bisnis

6) penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam

(jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N).

Analisis lain di bidang penilaian secara tepat waktu adalah:

- 1) analisis yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk analisis di bidang penilaian, antara lain, analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik, analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, dan sebagainya.

*jumlah hari tersebut berlaku:

- a. untuk objek penilaian yang dimohonkan sampai dengan 5 objek, dalam kelipatan 5 objek selanjutnya akan menambah 2 hari kerja.
- b. untuk Peralatan dan mesin yang memiliki bukti kepemilikan dan kendaraan bermotor dalam kelipatan 10 objek akan menambah 2 hari kerja.
- c. untuk Peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan selain kendaraan bermotor dalam kelipatan 50 objek akan menambah 2 hari kerja.

(Contoh: permohonan penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN/BMD dengan jumlah objek 20 maka penyelesaian penilaian paling lama 23 (17 + 2*3) hari terhitung mulai tanggal surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku.

IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian pada tahun 2023 memiliki indeks besaran target sebesar 70 dan realisasi sebesar 83,36 sehingga capaiannya adalah 119,09%.

IKU ini merupakan IKU baru tanpa data historis dan tidak ada dalam renstra dan renja.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	-	-	-	-	70%
Realisasi	-	-	-	-	83,36%

Untuk itu, tidak ada kendala/permasalahan dalam pencapaian IKU ini. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan, antara lain:

- 1) Berkoordinasi dengan seksi PKN untuk menjaga deviasi ketergunaan hasil penilaian sehingga laporan penilaian dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan dalam membuat keputusan
- 2) Melakukan peer-reviu Laporan Penilaian

Berikut *trajectory* IKU pada tahun 2023.

4b-CP	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional						
	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	70	70	70	70	70	70	Max/AVG
Realisasi	100	100	100	100	83,36	83,36	
Capaian	120%	120%	120%	120%	119,09%	119,09%	

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan, yaitu mengestimasi waktu penyelesaian dan pelaksanaan penilaian dengan baik

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp57.180.000,00	Rp50.895.000,00	201 surat persetujuan/penolakan
2	Rekomendasi Hasil Penilaian	Rp13.440.000,00	Rp12.270.000,00	Dihasilkan 2 rekomendasi

*Kegiatan tersebut menjadi faktor tercapainya beberapa IKU

Rencana aksi yang akan dilakukan ke depan ialah dengan melakukan pemantauan penyelesaian penilaian.

5) Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil penilaian yang tepat guna.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi ke dalam 2 IKU yang akan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

a) Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*).

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan tindak lanjut penyampaian rekomendasi untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah korektif dari satker atas rekomendasi KPKNL.

IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada tahun 2023 memiliki indeks besaran target sebesar 100% (51 NUP) dan realisasi sebesar 120% (62 NUP). Jika dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 100%, hal ini masih sesuai/selaras.

Berikut perbandingan capaian IKU dalam beberapa tahun terakhir. Capaian IKU ini menunjukkan progres yang positif setiap tahunnya.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	-	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	121%	101,49%	110,48%	120%

Dalam pencapaian IKU ini, hal yang menjadi permasalahan, antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran satker dalam mengelola potensi BMN
- 2) Data BMN yang terdapat pada aplikasi SIMAN belum dimutakhirkan
- 3) Terdapat perbedaan antara data pada aplikasi dengan kondisi di lapangan.

Hal yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di atas, antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh satker di lingkungan KPKNL Bengkulu terkait pengisian form evaluasi BMN
- 2) Melakukan pemetaan terhadap BMN yang akan dievaluasi kinerjanya
- 3) Melakukan survei fisik dalam rangka Evaluasi BMN

Adapun trajectory IKU pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

5a-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal						
	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	12%	32%	32%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	13,41%	47.22%	47.22%	86.75%	120%	120%	
Capaian	7/51	27/51	27/51	46/51	62/51	62/51	

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan yaitu melakukan survei fisik dalam rangka Evaluasi BMN.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	22.970.000	20.625.000	Dihasilkan 68 Rekomendasi

Adapun rencana aksi ke depan yang bisa dilakukan, yaitu terus berkoordinasi dengan satker terkait pengisian form dan penyelesaian evaluasi kinerja BMN.

b) Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online

Definisi Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sementara pengertian umum Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Modul Permohonan *Online* adalah suatu modul yang digunakan oleh *stakeholder*/Pemohon Lelang untuk dapat menyampaikan permohonan layanan lelang secara online. Melalui modul ini pemohon lelang mengajukan permohonan lelangnya secara online melalui jaringan internet dengan melampirkan *scan* dokumen persyaratan lelang. Pemohon menginput data-data terkait lelangnya ke dalam database melalui aplikasi ini.

Dengan terimplementasikannya permohonan lelang *online*, maka penginputan data lelang sebagai salah satu materi dalam info lelang, pencetakan laporan lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat dilakukan lebih cepat dan secara otomatis oleh sistem aplikasi. Pelaksanaan implementasi permohonan lelang *online* dapat dilakukan untuk

jenis lelang Noneksekusi Suakarela, Noneksekusi Wajib dan Eksekusi yang telah terimplementasi di lelang.go.id

IKU ini menghitung persentase dengan membandingkan jumlah permohonan lelang *online* melalui modul permohonan lelang *online* dengan jumlah permohonan lelang seluruhnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder sehingga lelang dapat dilaksanakan lebih efisien, cepat, optimal, dan akuntabel.

IKU Persentase pelaksanaan permohonan lelang *online* pada tahun 2023 memiliki indeks besaran target sebesar 86% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 116,28%. IKU ini tidak terdapat dalam indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 maupun renja.

IKU ini juga merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	-	-	-	-	86%
Realisasi	-	-	-	-	100%

Kendala yang biasa terjadi adalah apabila portal lelang sedang maintenance sehingga ada hambatan dalam mengajukan permohonan. Adapun mitigasi/tindakan yang telah dilakukan adalah dengan mengingatkan para *stakeholder* untuk mengajukan permohonan sesegera mungkin agar dapat segera diproses untuk dibuatkan jadwal lelangnya.

Trajectory IKU pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

5b-N	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	111/111	324/324	293/293	542/542	542/542	871/871	871/871	

Tindakan *extra effort* dalam pencapaian IKU ini, yaitu mensosialisasikan tata cara permohonan lelang melalui modul permohonan lelang *online*.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	3.200.000	2.707.500	Dihadiri sejumlah 150 orang

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya, antara lain:

- 1) Menetapkan pelaksanaan lelang seluruhnya melalui *e-auction*
- 2) Melanjutkan kegiatan monitoring pada modul permohonan lelang *online*.

6) Sasaran Strategis: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- 1) terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- 2) Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti
- 3) Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN
- 4) Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti

Sasaran strategis ini diidentifikasi melalui 1 (satu) IKU sebagai berikut.

a) Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dikategorikan sesuai dengan kriteria yang ditindaklanjuti sebagai berikut.

Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat Perjanjian Sewa 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala KPKNL

	Kerja Sama Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk KSP yang pemilihan mitranya melalui tender
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk BGS/BSG yang pemilihan mitranya melalui tender
	Pinjam Pakai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
Pemindahtanganan	Penjualan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah lelang (baik dengan pemenang lelang maupun tidak ada peminat) atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP
	Tukar Menukar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti. 3. pelaksanaan pemilihan mitra tukar menukar untuk tukar menukar yang pemilihan mitranya melalui tender
	Hibah	Berita acara serah terima

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melalui penguatan peran Pengawasan dan Pengendalian BMN oleh Pengelola Barang.

IKU Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara pada tahun 2023 memiliki indeks besaran target sebesar 86% dan realisasi sebesar 91,94%% sehingga capaiannya sebesar 106,90%. Jika dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 dan Rencana Kerja K/L Tahun 2023 sebesar 80%, hal ini masih sesuai/sejalan.

Dalam 5 tahun terakhir, realisasi IKU menunjukkan tren yang cukup positif. Berikut adalah perbandingan target dan realisasinya.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	70%	80%	85%	85%	86%
Realisasi	80%	80,95%	90,36%	92,65%	91,94%

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU adalah kurang patuhnya satker dalam menindaklanjuti persetujuan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN. Untuk itu, tindakan yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan ke depannya antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* melalui media whatsapp/telepon
- 2) Meminta Bukti Penerimaan Negara atas hasil dari pemindahtanganan BMN

Adapun *trajectory* pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

6a-CP	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif						
	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	50%	50%	-	86%	86%	Max/TLK
Realisasi		57,14%	59,62%	82,54%	91,94%	91,94%	
Capaian		57,14%	59,62%	82,54%	91,94%	91,94%	

Tindakan *extra effort* yang dilaksanakan untuk pencapaian IKU ini ialah Melakukan pembinaan dan monitoring kepada *stakeholder*.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp 57.180.000,00	Rp 50.895.000,00	Dihasilkan 201 surat persetujuan/penolakan
2	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp 2.315.000,00	Rp 2.295.000,00	Dihadiri sejumlah 111 orang

Adapun rencana aksi ke depan yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) meningkatkan pelaksanaan Wasdal BMN khususnya untuk pemantauan terhadap persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang
- 2) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pengguna Barang untuk melaksanakan seluruh persetujuan pengelolaan BMN yang telah ditetapkan

7) Sasaran Strategis: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan mewadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi menjadi 2 IKU yang diuraikan sebagai berikut.

a) Rata-Rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik

Informasi Publik adalah Informasi yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Waktu ketepatan penyampaian Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon Informasi Publik dihitung sejak permintaan informasi publik diterima oleh PPID Tingkat III. IKU ini bertujuan untuk mewujudkan layanan informasi publik yang tepat waktu.

IKU Rata-Rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik pada tahun 2023 memiliki indeks besaran target sebesar 100 dan tidak terdapat realisasi karena tidak ada permohonan informasi yang masuk. IKU ini tidak terdapat dalam indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 maupun renja.

IKU ini juga merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	-	-	-	-	100
Realisasi	-	-	-	-	-

Kendala/akar masalah yang biasa terjadi dalam pencapaian ini adalah indeks penilaian yang hanya memiliki satu komponen saja terkait ketepatan waktu. Sementara hal tersebut tidak dapat diperhitungkan jika tidak ada permohonan yang masuk.

Tindakan yang telah dilakukan, yaitu menyantumkan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, yang wajib diumumkan secara serta merta, serta yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada *website* KPKNL Bengkulu untuk tercapainya keterbukaan informasi publik.

Trajectory IKU pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

7a-N	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Capaian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

Belum terdapat tindakan *extra effort* dalam pencapaian IKU ini karena tidak ada permohonan informasi yang masuk.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini ditunjukkan melalui pembentukan Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik PPID Tingkat III melalui Surat Keputusan Kepala KPKNL Bengkulu yang terdiri dari satu orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi serta satu orang pelaksana Seksi Hukum dan Informasi.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya, antara lain:

- 1) Sosialisasi kepada pegawai internal terkait layanan informasi melalui mekanisme PPID
- 2) Terus melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui *update* informasi publik secara berkala di *website* KPKNL Bengkulu.

b) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun, yaitu 30 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 30 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan *training* dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon IV/JF setara dan pelaksana/JF setara.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- 1) bawahan yang akan pensiun di tahun 2023;
- 2) bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- 3) bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2023;
- 4) pegawai yang mutasi setelah 30 November 2023 tidak diperhitungkan di unit barunya;
- 5) pegawai pada unit non-eselon.

IKU ini bertujuan untuk mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini juga bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada tahun 2023 memiliki indeks besaran target sebesar 100% dan realisasi sebesar 120% dengan seluruh pegawai berhasil memenuhi jamlatnya.

IKU ini tidak terdapat dalam indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 maupun renja.

Dalam 5 tahun terakhir, KPKNL Bengkulu berhasil menunjukkan capaian yang positif dalam IKU ini. Berikut perbandingan target dan realisasi IKU dalam 5 tahun terakhir.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
-----	------	------	------	------	------

Target	87%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	120%	120%	120%	120%

Kendala yang dijumpai dalam pencapaian IKU, di antaranya:

- 1) Kendala kelancaran jaringan dalam mengakses PJJ/ *e-learning*
- 2) Kurangnya kesadaran pegawai dalam mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan.

Tindakan yang telah dilakukan, yaitu:

- 1) Monitoring pelaksanaan sosialisasi yang diikuti pegawai dalam rangka memenuhi 30 JP
- 2) Mengusulkan diklat melalui Aplikasi Diklat DJKN
- 3) Melakukan Rekapitulasi melalui aplikasi DAPIT

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

7b-N	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	30/30	30/30	29/29	29/29	28/28	28/28	28/28	

Tindakan *extra effort* yang dilaksanakan untuk pencapaian IKU tersebut adalah membuat nota dinas terkait pengajuan usulan diklat kepada seluruh pegawai.

Adapun efisiensi sumber daya terkait dengan pengembangan kompetensi pegawai tidak menggunakan DIPA KPKNL Bengkulu dalam hal metode pembelajaran *e-learning*/PJJ. Sementara untuk diklat klasikal menggunakan DIPA Sekretariat DJKN.

Rencana aksi ke depan terkait dengan pengembangan kompetensi pegawai, yaitu melalui penyusunan dokumen *Individual Development Plan* (IDP) di awal tahun yang nantinya akan menjadi acuan para pegawai terkait pengembangan kompetensinya.

8) Sasaran Strategis: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Penguatan Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan

tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kemenkeut telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bengkulu mengidentifikasi 3 IKU sebagai berikut.

a) Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2023 memiliki indeks besaran target sebesar 100 (95,5) dan realisasi sebesar 109,64% dengan capaian 96,42. Jika dibandingkan dengan indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 maupun Rencana Kerja K/L tahun 2023 sebesar 95, hal ini masih sejalan/sesuai.

Dalam 5 tahun terakhir, realisasi IKU ini semakin menunjukkan tren positif. Berikut adalah perbandingan target dan realisasi IKU.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	95	95	95,5	95,5	95,5
Realisasi	90,61	95,96	95,6	95,98	96,42

Kendala/akar masalah dalam pencapaian IKU ini, antara lain.

- 1) Adanya perubahan timeline pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (penyerapan) seksi teknis
- 2) Adanya faktor eksternal yang mengakibatkan rencana kegiatan tidak dapat dilaksanakan
- 3) Seksi terkait baru dapat melaksanakan RKA pada akhir tahun akibat pekerjaan yang menumpuk pada triwulan III

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu.

- 1) Melakukan *resource forum* untuk menentukan rencana kerja anggaran
- 2) Melaksanakan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan
- 3) Mengimbuu seksi teknis untuk segera merealisasikan rencana kerja anggarannya sesuai dengan *timeline*

Adapun *trajectory* IKU pada 2023 adalah sebagai berikut.

8a-CP	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q4	Q4	Y	Pol/ K P
Target	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	Max/TLK
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	107,365	109,64%	
Capaian	100	99,99	99,99	99,99	98	96,42	96,42	

Rincian capaian SMART

	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1	Capaian Rincian Output	100,00	43,50%	43,50
2	Efisiensi	78,51	28,60%	22,45
3	Konsistensi RPD	99,26	18,20%	18,07
4	Penyerapan Anggaran	91,13	9,70%	8,84
Capaian SMART				92,86

Rincian Capaian IKPA

Indikator	Proyeksi Nilai (per 31 Des 2023)	Bobot	Proyeksi Nilai Akhir (per 31 Des 2023)
Revisi DIPA	100,00	10	10,00
Deviasi Hal III DIPA	100,00	10	10,00
Penyerapan Anggaran	100,00	20	20,00
Belanja Kontraktual	0,00		
Penyelesaian Tagihan	0,00		
Pengelolaan UP dan TUP	99,83	10	9,98
Dispensasi SPM	100,00	5	5,00

Capaian Output	100,00	25	25,00
Total	599,83	80	99,98

Tindakan *extra effort* yang telah dilaksanakan, yaitu dalam melaksanakan revisi anggaran untuk mengoptimalkan sisa anggaran yang tersedia.

Adapun rencana aksi ke depannya, antara lain:

- 1) Meminta rencana kerja dan timeline dari setiap seksi/jafung
- 2) Mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun baik dari sisi waktu dan penyerapan anggaran
- 3) Mendorong pelaksana kegiatan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesegera mungkin
- 4) Melakukan evaluasi bersama pelaksanaan anggaran secara berkala
- 5) Melakukan revisi anggaran apabila diperlukan

b) Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertipikasi, pemanfaatan aplikasi BMN, dan pemanfaatan aplikasi pengadaan.

IKU diukur dari 3 komponen, yakni

1) Proses Pengajuan Sertipikasi

Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertipikat telah diajukan ke Kantor Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.

2) Pemanfaatan Aplikasi BMN

Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

3) Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2024 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2024 yang menjadi target

b. e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada tahun 2023 memiliki indeks besaran target sebesar 100% dan realisasi sebesar 163,03%. IKU ini tidak terdapat dalam indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 maupun renja.

IKU ini selalu mencapai realisasi dari target yang ditetapkan pada awal tahun. Berikut perbandingannya dalam 5 tahun terakhir.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	100%	-	-	100%	100%
Realisasi	120%	-	-	182%	163,03%

Kendala dalam pencapaian IKU ini ialah tidak semua barang yang dibutuhkan tersedia dalam system aplikasi pengadaan. Adapun Tindakan yang telah dilakukan adalah dengan memaksimalkan pengadaan yang ada dalam system aplikasi.

Berikut *trajectory* pada 2023.

8b-N	PPenguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	Persentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target						100%	100%	Max/TLK
Realisasi						163,03%	163,03%	
Capaian								

Tindakan yang telah dilakukan dan rencana ke depannya adalah dengan melakukan monitoring pengelolaan BMN dan pengadaan.

Adapun efisiensi sumber daya dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Kerumahtangaan	Rp 62.038.000,00	Rp 52.304.700,00	selama 12 bulan layanan
2	Layanan Perkantoran	Rp 1.587.292.000,00	Rp 1.226.903.086,00	selama 12 bulan layanan
3	Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp 34.579.000,00	Rp 33.448.400,00	Dihasilkan sejumlah 1 unit LCD Proyektor, 3 unit AC Split, dan 3 unit Printer

c) Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- 2) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi *Dropbox*/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBPN dari Bidad PPN adalah 15%

Target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%.

IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN pada tahun 2023 memiliki indeks besaran target sebesar 15% dan realisasi sebesar 120% dengan capaian 0 menggunakan metode polarisasi *minimize*. IKU ini tidak terdapat dalam indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 maupun renja.

Berikut adalah target dan realisasi beberapa tahun terakhir.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	-	-	12,50%	10%	15%
Realisasi	-	-	0%	0%	0%

Hal yang menjadi kendala dalam pencapaian IKU ini adalah:

- 1) Keterlambatan pemuktahiran data pada aplikasi OMSPAN dan adanya kendala kelancaran jaringan internet di luar kendali pegawai/PIC
- 2) Perubahan status pemenang lelang menjadi wanprestasi mempengaruhi data pada aplikasi *dropbox*
- 3) Penarikan data yang dilakukan berbeda dengan waktu penutupan pembukuan pada aplikasi Pegadaian.

Tindakan yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan untuk pencapaian IKU ini yaitu melakukan input data pada aplikasi *dropbox* pada sesuai dengan waktu yang ditetapkan

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2023 sebagai berikut.

8c-CP	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal						
	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	15%	15%	15%	15%	15%	15%	Min/TLK
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	0%	0%	0%	0%	0	0	

Tindakan *extra effort* yang dilakukan, yaitu melakukan input data pada aplikasi dropbox dengan ketelitian dan kecermatan tinggi. Sementara rencana aksi ke depan, yaitu dengan melakukan input data tepat waktu dan teliti.

9) Sasaran Strategis: Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Sasaran strategis ini diidentifikasi menjadi 2 IKU berikut.

a) Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Kegiatan penilaian efektivitas Unit Kepatuhan Internal memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

- 1) Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi
- 2) Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)
- 3) Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA)
- 4) Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP)
- 5) Penyusunan dan Pemanfaatan *Fraud Risk Scenario* (FRS)
- 6) Penyusunan Profil Pegawai
- 7) Penyusunan Simpulan dan LPPI
- 8) Jumlah Pengaduan Masyarakat
- 9) Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
- 10) Kepuasan *Stakeholders*
- 11) Hasil Survei Penilaian Integritas.

IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif pada tahun 2023 memiliki indeks besaran target sebesar 60 dan realisasi sebesar 90 sehingga capaiannya 120%. IKU ini tidak terdapat dalam indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 maupun renja.

IKU ini juga termasuk IKU baru tanpa data historis

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	-	-	-	-	60
Realisasi	-	-	-	-	90

Hal yang menjadi kendala dalam pencapaian IKU ini adalah:

- 1) Terbatasnya anggaran dana untuk melakukan pemantauan langsung kepada seksi teknis yang melakukan dinas luar kota

Tindakan yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU ini yaitu Melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal sesuai dengan ketentuan dan *timeline* yang telah ditetapkan serta membuat laporan pengendalian intern setiap bulannya.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2023 sebagai berikut.

9a-CP	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
	Indeks Pengawasan dan Pengendalian Efektif							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	60	60	Max/TLK
Realisasi						90	90	
Capaian						120%	120%	

Tindakan *extra effort* yang dilakukan, yaitu berkoordinasi dengan seksi teknis dalam pemantauan layanan unggulan berupa pemeriksaan dokumen terkait layanan di seksi masing-masing,

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Kepatuhan Internal	Rp 4.402.000,00	Rp 4.190.000,00	Dihasilkan 7 Rekomendasi

Rencana aksi yang akan terus dilakukan, yaitu dengan melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan UKI kepada seluruh pegawai.

b) Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Jumlah unit di lingkungan DJKN yang mengikuti penilaian ZI-WBK/WBBM tahun 2023 sebagai berikut:

- 25 unit diusulkan WBBM
- 9 unit diusulkan WBK

Indeks Penilaian IKU ini adalah sebagai berikut.

- a. Tidak lolos penilaian level TPE1 karena alasan fraud dan/atau pelanggaran integritas - 60
- b. Tidak lolos penilaian level TPE1 karena alasan non fraud - 70
- c. Tidak lolos penilaian level TPK dan/atau tidak memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM karena alasan fraud dan/atau pelanggaran integritas - 80
- d. Tidak lolos penilaian level TPK dan/atau tidak memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM karena alasan non fraud - 90
- e. Lolos penilaian level TPK dan berpredikat ZI-WBK/WBBM - 100

IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM pada tahun 2023 memiliki indeks besaran target sebesar 100 dan realisasi sebesar 90 sehingga capainnya sebesar 90%. IKU ini tidak terdapat dalam indikator Sasaran Program pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020 sampai dengan 2024 maupun renja.

Jika dibandingkan dengan capaian realisasi pada beberapa tahun sebelumnya, target pada 2021 dapat tercapai karena KPKNL Bengkulu berhasil mendapatkan predikat ZI WBK dalam penilaiannya.

T/R	2019	2020	2021	2022	2023
Target	-	-	75	-	100
Realisasi	-	-	95,63	-	90

Hal yang menjadi kendala dan kemungkinan penyebab kegagalan pencapaian predikat WBBM pada 2023 dalam pencapaian IKU ini adalah:

- 1) Pergantian tim Penilai yang semula dalam kewenangan Itjen Kemenkeu menjadi kembali berpindah ke PAN-RB pada pertengahan tahun. Hal ini memunculkan kemungkinan adanya aspek penilaian yang berbeda dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atau hal lainnya
- 2) Tidak ada penjelasan rinci dari PAN-RB apa penyebab kegagalan tersebut. Meski begitu, KPKNL Bengkulu bukanlah satu-satunya kantor pelayanan yang belum berhasil mendapatkan predikat WBBM karena tidak ada satu pun kantor pelayanan di Kementerian Keuangan yang berhasil. Keberhasilan pencapaian WBBM tahun 2023 hanya diraih oleh beberapa Kantor Wilayah saja.

Tindakan yang telah dilakukan adalah melaksanakan rencana kerja WBBM yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan semaksimal mungkin dan mencegah terjadinya *fraud*.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2023 sebagai berikut.

9b-N	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	100	100	Max/TLK
Realisasi						90	90	
Capaian						90%	90%	

Tindakan *extra effort* yang dilakukan, yaitu melengkapi dan memenuhi dokumen-dokumen yang harus diunggah sesuai Lembar Kerja Evaluasi.

Adapun efisiensi sumber daya dalam pencapaian ini adalah dengan mengerahkan seluruh pegawai KPKNL Bengkulu, baik ASN maupun PPNNP sebagai tim pembangunan ZI WBBM sehingga semua memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing di dalam tim.

Sementara rencana aksi ke depan, yaitu dengan tetap melanjutkan pembangunan ZI WBBM secara mandiri pada 2024 untuk mempersiapkan penilaian WBBM di tahun 2025.

REALISASI ANGGARAN

Untuk realisasi penyerapan anggaran dan pengukuran capaian output belanja dan penyerapan anggaran KPKNL Bengkulu tahun anggaran 2023, dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Pengukuran Capaian Penyerapan Anggaran
KPKNL Bengkulu Tahun 2023**

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Penyerapan
1	Belanja Pegawai	-	-	0%
2	Belanja Barang	Rp1,977,599,000	Rp1,800,155,754	91%
3	Belanja Modal	Rp34,579,000	Rp33,448,400	97%
TOTAL		Rp2,012,178,000	Rp1,833,604,154	91.13%

Pengukuran Capaian Output Non Belanja Pegawai TA 2023

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi Anggaran
1	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp2,315,000	Rp2,295,000
2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	Rp3,200,000	Rp2,707,500
3	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp57,180,000	Rp56,660,000
4	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	Rp22,205,000	Rp14,030,000
5	Risalah Lelang	Rp4,260,000	Rp3,980,000
6	Risalah Lelang Sukarela UMKM	Rp40,000,000	Rp34,649,400
7	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	Rp22,970,000	Rp20,625,000
8	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	Rp60,920,000	Rp54,875,000
9	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	Rp2,256,000	Rp1,940,000
10	Rekomendasi Hasil Penilaian	Rp13,440,000	Rp12,270,000

11	Penggalian Potensi Lelang	Rp60,000,000	Rp55,310,000
12	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	Rp17,673,000	Rp15,705,000
13	Layanan Bantuan Hukum	Rp12,716,000	Rp12,660,000
14	Kerumahtanggaan	Rp62,038,000	Rp60,922,847
15	Layanan Perkantoran	Rp1,587,292,000	Rp1,443,105,207
16	Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp34,579,000	Rp33,448,400
17	Kehumasan	Rp4,732,000	Rp4,230,800
18	Rekomendasi Kepatuhan Internal	Rp4,402,000	Rp4,190,000
TOTAL		Rp2,012,178,000	Rp1,833,604,154
Efisiensi		8.87%	

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa KPKNL Bengkulu berhasil mewujudkan pelaksanaan anggaran yang optimal dan sangat baik dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 8,87%% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 91,13%%.

BAB IV | Penutup

Laporan Kinerja KPKNL Bengkulu ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

KPKNL Bengkulu telah menerapkan manajemen kinerja, yakni dengan membuat cascading target kinerja dengan menurunkan sasaran strategis Kemenkeu *Four*, memperjelas sasaran strategis dengan IKU, serta penandatanganan kontrak kinerja sampai tahap pelaksana.

Dalam perjalanannya, KPKNL Bengkulu juga melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk pelaporan berkala capaian kinerja, dan pelaksanaan rapat evaluasi. Dengan ini, diharapkan nilai kinerja organisasi KPKNL Bengkulu mampu terus meningkat setiap tahunnya.

Sebagai salah satu kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Bengkulu mampu menjalankan tugasnya dengan kinerja organisasi tahun 2023 sebesar 113,43%.

Adapun langkah-langkah atau strategi yang akan dilakukan KPKNL Bengkulu dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
 - a) Peningkatan kualitas layanan agar realisasi PNPB tahun 2023 semakin meningkat dan memperkokoh misi DJKN sebagai *Revenue Center*.
 - b) Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Satuan Kerja agar program-program pengelolaan kekayaan negara berjalan dengan baik.
2. Bidang Pengurusan Piutang Negara
 - a) Upaya penagihan akan terus diintensifkan baik melalui telepon, surat maupun kunjungan langsung ke lapangan.
 - b) Penggalan potensi pengurusan Piutang Negara ke Pemerintah Daerah dan koordinasi dengan Penyerah Piutang.
3. Bidang Lelang
 - a) Memanfaatkan Pekan Lelang dalam mengenalkan lelang kepada masyarakat dan *stakeholders*.
 - b) Penggalan potensi lelang kepada *stakeholders* yang masih jarang memanfaatkan layanan lelang.
4. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
 - a) Melakukan penajaman atas rencana kegiatan dan pembiayaan yang tercantum dalam DIPA TA 2024 tanpa menghilangkan efektivitas pencapaian *outcome*
 - b) Meningkatkan evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran dan pencapaian output

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak mengenai tugas dan fungsi KPKNL Bengkulu sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara internal, Laporan Kinerja dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi ke depannya. Sementara secara eksternal, Laporan Kinerja dapat menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga KPKNL Bengkulu dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.



LAMPIRAN



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Instansi: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu

Tahun : 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	125,2	120
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80	105	120
		1c-CP	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	123,55	120
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	140,54	120
		2c-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100	106,2	106,2
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68	72,73	106,95
		3b-CP	Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN	100	100	100
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	0	120
		4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	70	83,36	119,09
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	121,25	120
		5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86	100	116,28
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86	91,94	106,9
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya	7a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu	100	n/a	n/a

	Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif		Penyediaan Informasi Publik			
		7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	120	120
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100 (95,5)	109,44	109,44
		8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	163,03	120
		8c-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15	0	120
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	9a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	88,67	90	120
		9b-CP	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	90	90

Jumlah anggaran tahun 2023 : Rp2.012.178.000

Jumlah realisasi anggaran tahun 2023 : Rp1.833.604.154

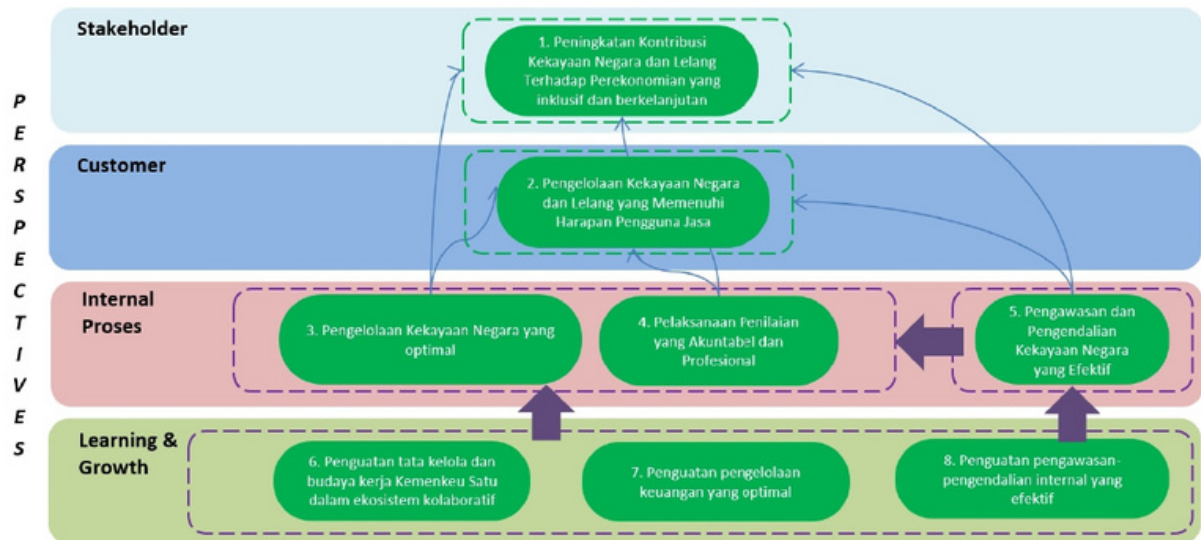
CHECKLIST KELENGKAPAN NARASI IKU

No.	Kelengkapan	Checklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2023)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: *capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; * target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi * target pada Renja Kemenkeu Tahun 2023 *Standar Nasional (jika ada)	√
5	Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2023	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/WKN.05/2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BENGKULU
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BENGKULU
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
		2c-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	100%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%
		3b-CP Persentase Penyelesaian BKPN	100%
		3c-CP Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
		5b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
6.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	6a-N Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100
		6b-N Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%
		6c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	7a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5)
		7b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8.	Penguatan Pengawasan- Pengendalian Internal yang Efektif	8a-CP Indeks Integritas	88,67
		8b-CP Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4)
		8c-N Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Program/ Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

1. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp	290.618.000
2. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	5.515.000
3. Pengelolaan Aset	Rp	285.103.000
4. Program Dukungan Manajemen	Rp	1.705.759.000
5. Legislasi dan Litigasi	Rp	12.716.000
6. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.683.909.000
7. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	4.732.000
8. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	4.402.000

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Dudung Rudi Hendratna

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Teddy Suhartadi Permadi



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BENGKULU
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2c-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
3b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3c-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
5	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
5a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	50%	86%	86%
5b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
6a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
7a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)
7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
8	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
8a-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
8b-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (Level 4)	100 (Level 4)
8c-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Bengkulu,



Ditandatangani Secara Elektronik
Teddy Suhartadi Permadi



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Teddy Suhartadi Permadi		NAMA	Dudung Rudi Hendratna	
NIP	197303101999031002		NIP	197006221991031002	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A. UTAMA					
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara) (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan	
2.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara) (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal	Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan	



	Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)			
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan
5.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	100%	Penerima Layanan
6.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	Proses Bisnis
7.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	Proses Bisnis
8.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
9.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	Proses Bisnis

10.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
11.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	Proses Bisnis
12.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	Proses Bisnis
13.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	Penguatan Internal atau Anggaran
14.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	Penguatan Internal atau Anggaran
15.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
16.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100 (95,5)	Penguatan Internal atau Anggaran



17.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Indeks Integritas	88,67	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4)	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				
1.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	Penguatan Internal
2.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	Persentase Pemenuhan Tim Kerja PUG KPKNL Bengkulu	100%	Penguatan Internal

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

PERILAKU KERJA	
	- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti
	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan,
	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



Ditandatangani secara elektronik
Teddy Suhartadi Permadi
197303101999031002



Ditandatangani secara elektronik
Dudung Rudi Hendratna
197006221991031002

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	31 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasi kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
4	Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
5	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
6	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
7	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%



8	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
11	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	50%	86%	86%
12	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
13	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)
17	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
18	Indeks Integritas						88,67	88,67
19	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP						100 (Level 4)	100 (Level 4)
20	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM						100	100

KONSEKUENSI

1. Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawa



Ditandatangani secara elektronik
 Teddy Suhartadi Permadi
 197303101999031002

31 Januari 2023
 Pejabat f



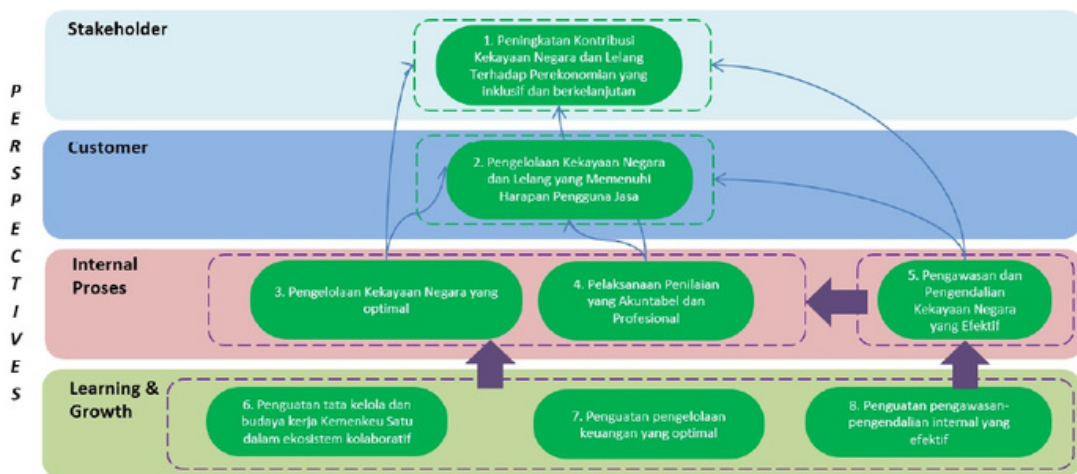
Ditandatangani secara elektronik
 Duding Rudi Hendratna
 197006221991031002



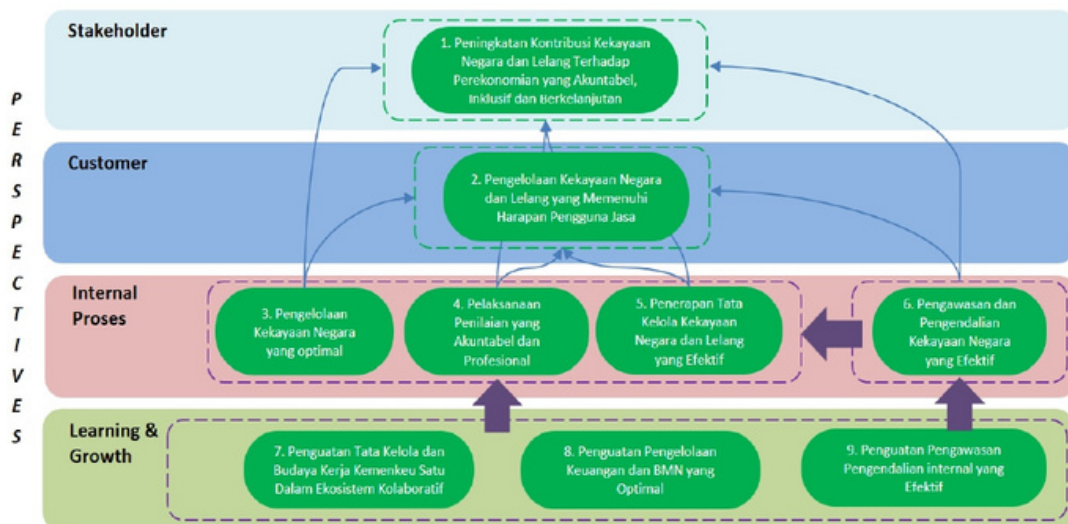
**ADDENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1.1A/WKN.05/2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BENGKULU
TAHUN 2023**

Pada hari ini, telah disepakati adanya *addendum* atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-1.1/WKN.05/2023 tanggal 16 Juni 2023 , dengan rincian sebagai berikut:

Peta Strategis sebelum adendum:



Peta Strategis setelah adendum:



a. Perubahan Sasaran Strategis

Sebelum		Menjadi	
Nomor SS	Nama Sasaran Strategis	Nomor SS	Nama Sasaran Strategis
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

b. Penambahan Sasaran Strategis

Sebelum		Menjadi	
Nomor SS	Nama Sasaran Strategis	Nomor SS	Nama Sasaran Strategis
-	-	5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

c. Perubahan Nama IKU

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU	Nama IKU	Kode IKU	Nama IKU
3c-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	5a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

d. Reposisi Indikator Kinerja Utama dan antar Sasaran Strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d Q3	Q4	Y			Q3	s.d Q3	Q4	Y
<i>Learning and growth perspective</i>						<i>Stakeholder perspective</i>					
8	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal Yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan				
8a-CP	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67	1c-CP	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67
<i>Internal Process perspective</i>						<i>Internal Process perspective</i>					
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal					5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
3c-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	32,1 4%	32,1 4%	57,14 %	57,14 %	5a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	32,1 4%	32,1 4%	57,1 4%	57,1 4%
<i>Internal Process perspective</i>						<i>Learning and growth perspective</i>					
5	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif					8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				

5b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	8e-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%
<i>Learning and growth perspective</i>						<i>Internal Process perspective</i>					
6	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif					5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
6b-N	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	23%	23%	46%	46%	5b-N	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	23%	23%	46%	46%

e. Penambahan IKU

Sebelum	Menjadi						Penjelasan
	Kode IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				
			Q3	S.d. Q3	Q4	Y	
-	9a-CP	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	60	60	

f. Penghapusan IKU

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
8b-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	IKU dihapus dari PK Kepala KPKNL Bengkulu

g. Perubahan Trajectory Target IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	12,1 2%	12,1 2%	20,2 %	20,2 %	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	20,2 %	20,2 %	20,2 %	20,2 %
7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100 %	100 %	100%	100%	8d-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

h. Perubahan Kode SS dan IKU

Kode SS/IKU		Sasaran Stragetis / Indikator Kinerja Utama
Sebelum	Menjadi	
5	6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif
5a-CP	6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

6	7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif
6a-N	7a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik
6c-N	7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai
7	8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal
7a-CP	8c-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran
7b-N	8d-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
8	9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal Yang Efektif
8c-N	9b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Bengkulu, September 2023

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah Jenderal
Kekayaan Negara Lampung dan
Bengkulu

Kepala Kantor Pelayanan,

Dudung Rudi Hendratna

Odyses Medwan Sinurat

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU

PERIODE PENILAIAN: 16 JUNI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA			
1	NAMA	Odyses Medwan Sinurat, S.H.	1	NAMA	Dudung Rudi Hendratna
2	NIP	197003141997031002	2	NIP (<i>*opsional</i>)	197006221991031002
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
4	JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu	4	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
5	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu	5	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Persentase Produktivitas Lelang Indeks Integritas	63,31% 20,2% 88,67	Penerima Layanan Penerima Layanan Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	73,07% 48%	Penerima Layanan Penerima Layanan

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	56,57%	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	68% 50%	Proses Bisnis Penguatan Internal atau Anggaran
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Deviasi ketergunaan hasil penilaian Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	25% 70	Proses Bisnis Proses Bisnis
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Persentase Pelaksanaan Lelang Online	57,14% 46%	Proses Bisnis Proses Bisnis
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	Proses Bisnis

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Lampung dan Bengkulu)			
7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Rata-Rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100 100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	100 (95,5) 100% 15%	Penguatan Internal atau Anggaran Penguatan Internal atau Anggaran Penguatan Internal atau Anggaran
9	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	60 100	Penguatan Internal atau Anggaran Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA*

1 Berorientasi pelayanan

PERILAKU KERJA*

	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terusmenerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban
5	Loyal <ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	

PERILAKU KERJA*		
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif <ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai

Lampung, 16 Juni 2023
Pejabat Penilai Kinerja

Odyses Medwan Sinurat
NIP 197003141997031002

Dudung Rudi Hendratna
NIP 197006221991031002

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 16 JUNI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	30 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	-	-	23,31%	23,31%	63,31%	63,31%
2	Persentase Produktivitas Lelang	-	-	-	20,2%	20,2%	20,2%	20,2%
3	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	-	-	56,14%	56,14%	73,07%	73,07%
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	-	-	-	28,54%	28,54%	48%	48%
6	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipatkan	-	-	-	33,94%	33,94%	56,57%	56,57%
7	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	-	-	55%	55%	68%	68%
8	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	-	-	-	30%	30%	50%	50%

9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	-	-	25%	25%	25%	25%
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	-	-	-	70	70	70	70
11	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	-	-	32,14%	32,14%	57,14%	57,14
12	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	-	-	-	23%	23%	46%	46%
13	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	40%	40%	86%	86%
14	Rata-Rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	-	-	-	100	100	100	100
15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	-	-	-	75%	75%	100%	100%
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)	100 (95,5)
17	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	100%	100%
18	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	-	-	-	15%	15%	15%	15%
19	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	-	-	60	60
20	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

KONSEKUENSI	
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Pegawai yang Dinilai

Lampung, 16 Juni 2023
Pejabat Penilai Kinerja

Odyses Medwan Sinurat
197003141997031002

Dudung Rudi Hendratna
197006221991031002



CAMKOHA

Cakap
Amanah
Melayani
KOmpeten
Handal
Akuntabel

